

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK GURU DI KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

LISA ANGGRENI¹, SUSDARYANTI EKO SETYOWATI², NURKOLIS³
 SDN 08 WARUNGPRING Kabupaten Pemalang¹, SMPN 1 SIWALAN Kabupaten Pekalongan², Universitas PGRI Semarang³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap motivasi kerja guru di Indonesia. Kebijakan PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan status resmi kepada guru honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada guru PPPK di beberapa sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPPK secara signifikan meningkatkan motivasi kerja guru, yang tercermin dari peningkatan kesejahteraan, pengakuan status, dan tanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPPK memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi agar dampak positif dapat dimaksimalkan. Rekomendasi diberikan untuk menganalisis perencanaan, kebutuhan dan meningkatkan motivasi. Dengan adanya evaluasi dan standar kinerja yang jelas, guru cenderung lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka dengan profesional.

Kata Kunci : Guru PPPK, Dampak , kebijakan

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the implementation of the Government Employees with Work Agreement (PPPK) policy on teacher work motivation in Indonesia. The PPPK policy was introduced as an effort to improve the quality of education by providing official status to honorary teachers. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews with PPPK teachers in several schools. The results of the study indicate that the implementation of the PPPK policy significantly increases teacher work motivation, which is reflected in increased welfare, recognition of status, and responsibility. These findings indicate that although the PPPK policy has great potential to improve the quality of education, challenges in its implementation need to be overcome so that positive impacts can be maximized. Recommendations are given to analyze planning, needs and improve motivation. With clear evaluation and performance standards, teachers tend to be more responsible in carrying out their duties professionally.

Keywords: PPPK Teachers, Impact, policy

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Untuk itu, PP ini juga mewajibkan agar setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai daftar jabatan fungsional yang bisa diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 76 Tahun 2022. Kepmenpan RB Nomor 76 Tahun 2022 mengatur tentang Perubahan Atas Copyright (c) 2024 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

Kepmenpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh PPPK salah satunya jabatan fungsional guru.

Pergeseran paradigma dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia telah membawa kebijakan baru yang bernama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sejak diperkenalkannya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan merekrut tenaga ahli yang memenuhi syarat tanpa harus melalui mekanisme rekrutmen CPNS yang panjang dan rumit. Namun, pada tahun terakhir, pemerintah memutuskan untuk membatalkan status PPPK, memicu kekhawatiran dan kebingungan di kalangan pegawai yang terkena dampak.

PPPK lahir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) mumpuni dan profesional yang selama ini kurang tersedia dalam PNS. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat dan tuntas, sehingga ketika pekerjaan selesai, kontrak perjanjian kerja pun dapat selesai. Namun, implementasi kebijakan ini juga telah menimbulkan pro dan kontra, dengan banyak orang mengasumsikan bahwa sebenarnya kehadiran PPPK tidak lebih dari “mengganti baju” istilah Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer/Staf Kontrak yang selama ini dipakai oleh instansi, baik di pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan akan SDM dengan cepat.

Penelitian ini difokuskan pada dampak positif dan negatif implementasi kebijakan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kecamatan Warungpring.

Penelitian mengenai dampak implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru sangat penting dilakukan karena beberapa alasan praktis berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan PPPK mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memahami hubungan antara kompetensi guru PPPK dan kinerja mereka, kita dapat mengevaluasi apakah kebijakan ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa

b. Kesejahteraan Guru

Kebijakan PPPK dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Penelitian dapat mengukur sejauh mana kebijakan ini berhasil dalam memberikan manfaat bagi guru, baik dari segi material maupun non-material, serta dampaknya terhadap motivasi dan produktivitas mereka dalam mengajar.

c. Peningkatan Profesionalisme Guru

Penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme guru dengan memberikan umpan balik tentang kinerja mereka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini penting untuk pengembangan karir guru dan peningkatan standar pendidikan secara keseluruhan.

Dampak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap guru memiliki beberapa alasan teoritis yang mendasari pentingnya implementasi kebijakan ini. Berikut adalah beberapa alasan tersebut:

a. Teori Kesejahteraan Sosial: Kebijakan PPPK dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru, yang merupakan elemen kunci dalam pendidikan. Dengan memberikan status resmi kepada guru honorer, kebijakan ini berupaya mengatasi masalah kesejahteraan yang selama ini menjadi kendala bagi banyak guru, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas pengajaran.

b. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): Dari perspektif manajemen SDM, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dalam pengelolaan tenaga pendidik. Dengan adanya penempatan guru PPPK, diharapkan ada peningkatan dalam kualitas pengajaran dan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada siswa..

- c. Teori Motivasi: Dari sudut pandang motivasi, status sebagai guru PPPK diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja para pendidik. Dengan adanya jaminan kesejahteraan dan peluang untuk pengembangan karier, guru diharapkan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar.

METODE PENELITIAN

Artikel ini berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan tahun 2024 di Kecamatan Warungpring pada penjang SD dengan teknik purposif sampling yaitu Guru pppk yang berada di lingkungan terdekat peneliti. Dikatakan purposive karena pemilihan sampel berdasarkan kesediaan guru pppk untuk memberikan akses informasi melalui wawancara. Informan penelitian ini adalah Guru pppk, kepala sekolah yang berada di lingkungan terdekat para peneliti. Untuk menjaga validitas penelitian maka dilakukan triangulasi metode yaitu dengan pengisian angket dan wawancara.

Instrumen kualitatif yang utama adalah para peneliti yang didukung dengan alat bantu berupa protokol wawancara. Instrumen kuantitatif menggunakan angket yang disebarluaskan melalui langsung ke responden dan diisi oleh Guru pppk dan Kepala Sekolah. Analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- a. Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap manajemen sumberdaya guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kekurangan Guru: PPPK memungkinkan sekolah-sekolah untuk menutupi kekurangan guru, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan guru berstatus ASN. Dengan adanya PPPK, kecamatan dapat memiliki lebih banyak guru yang secara administratif setara dengan ASN, sehingga kebutuhan pengajar dapat terpenuhi lebih cepat dan efektif.
2. Perencanaan dan Penempatan yang Lebih Efektif: Sistem PPPK memberikan fleksibilitas dalam penempatan guru berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Karena guru PPPK terikat kontrak, kepala sekolah dan dinas pendidikan dapat lebih mudah menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan keperluan pendidikan di wilayah kecamatan.
- b. Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap kesejahteraan guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.
 1. Kesejahteraan Ekonomi: Guru PPPK biasanya menerima gaji yang lebih stabil dan mendekati ASN, serta mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan pemerintah. Ini meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi guru, dibandingkan jika mereka hanya berstatus honorer dengan gaji yang terbatas.
 2. Kepastian Status dan Keamanan Kerja: Guru yang berstatus PPPK memiliki jaminan kontrak yang lebih resmi dibanding guru honorer, sehingga mereka lebih tenang dan merasa dihargai dalam peran mereka. Status ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dalam bekerja.
 3. Pengembangan Karier dan Pelatihan: Kebijakan PPPK sering kali mencakup kesempatan bagi guru untuk mendapatkan pelatihan profesional, yang bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam mengajar.
 4. Perlindungan Sosial: Dengan status PPPK, guru memiliki akses ke berbagai program perlindungan, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, yang meningkatkan kesejahteraan jangka panjang mereka.

- c. Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap motivasi guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
 - 1. Kepuasan Kerja Status sebagai pegawai PPPK memberikan keamanan kerja yang lebih besar dibandingkan status honorer. Dengan penghasilan dan jaminan yang lebih stabil, guru biasanya merasa lebih dihargai, yang berdampak positif pada kepuasan kerja. Selain itu, kepuasan kerja juga meningkat karena adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam sistem kepegawaian pemerintah, yang memungkinkan guru fokus pada pekerjaan tanpa khawatir tentang ketidakpastian status atau penghasilan.
 - 2. Komitmen pada Tugas PPPK menuntut komitmen dan profesionalisme yang lebih tinggi, yang secara alami mendorong guru untuk lebih serius dalam menjalankan tugas mereka. Rasa bangga sebagai pegawai pemerintah bisa meningkatkan loyalitas dan komitmen pada tugas mengajar dan pengembangan sekolah. Dengan adanya evaluasi dan standar kinerja yang jelas, guru cenderung lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka, baik di dalam maupun di luar kelas.

Pembahasan

Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap manajemen sumberdaya guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

1. Pemenuhan Kekurangan Guru

PPPK dinilai sebagai solusi efektif untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan hadirnya guru PPPK, kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi lebih cepat, sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Ini sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang sebelumnya menghadapi kesenjangan dalam ketersediaan tenaga pendidik. Status administratif guru PPPK yang setara dengan ASN juga memberikan stabilitas dan kepercayaan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.

2. Perencanaan dan Penempatan yang Lebih Efektif

Sistem kontrak pada guru PPPK memberikan fleksibilitas dalam penempatan sesuai kebutuhan sekolah. Hal ini memungkinkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia secara lebih dinamis. Penempatan guru dapat disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan spesifik wilayah, seperti kekurangan guru di mata pelajaran tertentu atau di sekolah yang terletak di daerah terpencil. Dengan demikian, sistem ini mendukung efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pendidikan di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, kehadiran PPPK memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap kesejahteraan guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan guru di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkaitan dengan dampak tersebut:

1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Guru

Kebijakan PPPK memberikan guru kepastian penghasilan yang lebih stabil dibandingkan guru honorer. Dengan adanya sistem kontrak yang diatur secara resmi oleh pemerintah, guru PPPK menerima gaji yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk tunjangan yang relevan. Hal ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka,

terutama bagi guru yang sebelumnya mengandalkan penghasilan dari gaji honorer yang seringkali rendah dan tidak menentu.

2. Pengakuan dan Status Profesional

Status PPPK memberikan pengakuan formal terhadap profesi guru, setara dengan ASN dari segi administrasi dan struktur pekerjaan. Pengakuan ini meningkatkan rasa percaya diri dan martabat guru, serta memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran. Guru PPPK juga lebih dihargai oleh masyarakat dan instansi pendidikan, yang berdampak positif pada kesejahteraan psikologis mereka.

3. Akses terhadap Hak dan Fasilitas Sosial

Guru PPPK memperoleh akses ke berbagai fasilitas sosial, seperti asuransi kesehatan (BPJS), jaminan hari tua, dan cuti yang diatur sesuai regulasi. Hak-hak ini memberikan jaminan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau oleh guru honorer, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup guru secara keseluruhan.

4. Tantangan dan Harapan Jangka Panjang

Meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti proses seleksi yang ketat dan keterbatasan kuota PPPK di beberapa wilayah. Hal ini dapat memunculkan kekhawatiran di kalangan guru honorer yang belum lolos seleksi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan lanjutan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan guru secara menyeluruh.

5. Efek Terhadap Kualitas Pendidikan

Dengan meningkatnya kesejahteraan, guru PPPK memiliki motivasi lebih besar untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi mereka. Dampaknya, kualitas pembelajaran di Kecamatan Warungpring juga berpotensi mengalami perbaikan, yang akan memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat setempat.

Dampak Implementasi Kebijakan PPPK guru terhadap motivasi guru di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru membawa perubahan signifikan terhadap motivasi kerja guru di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Berikut adalah analisis dampak kebijakan ini terhadap motivasi guru:

1. Peningkatan Motivasi Ekstrinsik

Kebijakan PPPK memberikan guru jaminan penghasilan tetap yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk akses pada tunjangan dan fasilitas kesejahteraan. Dengan adanya peningkatan aspek finansial, guru merasa lebih dihargai atas kerja keras mereka, yang secara langsung meningkatkan motivasi kerja. Selain itu, pengakuan status administratif sebagai PPPK memberikan rasa aman dalam pekerjaan, mendorong guru untuk berkomitmen lebih tinggi dalam melaksanakan tugas mereka.

2. Motivasi untuk Meningkatkan Kompetensi

Status PPPK menuntut guru untuk menjaga kualitas pengajaran dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Kebijakan ini mendorong guru untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan diri, sehingga tercipta kompetisi sehat untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik. Motivasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran tetapi juga membangun rasa percaya diri guru dalam menghadapi tantangan pendidikan.

3. Peningkatan Kepuasan Kerja

Guru yang berstatus PPPK merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka karena status ini memberikan kejelasan karier dan pengakuan atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Kepuasan kerja yang tinggi ini berdampak positif terhadap motivasi internal guru untuk memberikan yang terbaik bagi siswa dan lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.

4. Efek Positif pada Lingkungan Kerja

Implementasi kebijakan PPPK menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Guru merasa termotivasi karena mereka bekerja di bawah kebijakan yang mendukung dan memberikan penghargaan terhadap kinerja mereka. Selain itu, rasa kompetisi sehat di antara guru honorer yang belum menjadi PPPK memotivasi mereka untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pengajaran.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun dampak positifnya signifikan, implementasi kebijakan PPPK juga memunculkan tantangan yang dapat memengaruhi motivasi guru. Guru honorer yang tidak lolos seleksi mungkin merasa kurang dihargai atau kehilangan motivasi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan lanjutan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi guru honorer yang belum mendapatkan status PPPK.

6. Dampak Jangka Panjang pada Pendidikan

Motivasi yang meningkat di kalangan guru PPPK memberikan dampak jangka panjang pada kualitas pendidikan di Kecamatan Warungpring. Dengan guru yang lebih termotivasi, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik, sehingga hasil belajar siswa dan reputasi sekolah dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap guru, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki pengaruh yang signifikan baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah kesimpulan utama dari penelitian tersebut:

Perekutan guru PNS / sudah di gantikan dengan jalur pegawai pemerintah pada Perjanjian Kerja (PPPK). Pemenuhan Kekurangan Guru terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan guru berstatus ASN. Dengan adanya PPPK, kecamatan dapat memiliki lebih banyak guru yang secara administratif setara dengan ASN, sehingga kebutuhan pengajar dapat terpenuhi lebih cepat dan efektif. Sistem PPPK memberikan fleksibilitas dalam penempatan guru berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Karena guru PPPK terikat kontrak, kepala sekolah dan dinas pendidikan dapat lebih mudah menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan keperluan pendidikan di wilayah kecamatan. Kepastian Status dan Keamanan Kerja: Guru yang berstatus PPPK memiliki jaminan kontrak yang lebih resmi dibanding guru honorer, sehingga mereka lebih tenang dan merasa dihargai dalam peran mereka. Status ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Gore, C. (1981). Social development and social welfare: Implications for theory and practice. *Journal of Social Policy*, 10(1), 23–24.
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Penerbit.
- Herzberg, F. (1966). *Work and the nature of man*. Cleveland, OH: World Publishing Company.
- Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. (2012). *Educational administration: Concepts and practices*. London: Thomas Learning Berkshire House.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Robinson, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behavior* (16th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Suud, Mohammad. (2006). *Orientasi kesejahteraan sosial*. Jakarta: Prestasi.

Swaminathan, Dewi. (2015). Pengaruh self-efficacy dan motivasi kerja pada kepuasan kerja karyawan Happy Bali Tour & Travel Denpasar.

Titmuss, R. M. (1974). *Social policy: An introduction*. London: Allen & Unwin.

Widya Dwi Wahyuningtyas, & Lutfiana, S. A. (2023). Analisis dampak penetapan kuota PPPK guru di Kota Semarang yang terbatas terhadap banyaknya pendaftar.

Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (1965). *Industrial society and social welfare*. New York: The Free Press.